



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868309, 868405 Psw. 1331 – 1336, Faksimile (0274) 868309
Website : www.bkpp.slemankab.go.id, E-mail : bkpp@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 01/Kep.ka BKPP/2020**

T E N T A N G

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
KABUPATEN SLEMAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang dikuasai dan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang dikuasai dan Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan petunjuk dalam pelayanan informasi di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Informasi lain di luar lampiran daftar informasi publik yang dikuasai dan informasi publik yang dikecualikan akan diatur mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 8 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SLEMAN



H. PRIYO HANDOYO, SH, M.Si

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI

TAHUN 2020

NO	Ringkasan Isi Informasi	Jenis Informasi			Penanggung Jawab Pembuatan dan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi		Lokasi Penyimpanan / Penerbitan	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
		Berkala	Tersedia Setiap Saat	Serta Merta			Softcopy	Hardcopy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	√			Kepala BKPP	Sleman, 2017	√	√	Website BKPP	Permanen
	a. Nama OPD									
	b. Nomor telepon, alamat website dan email									
	c. Alamat lengkap									
	d. Tugas pokok dan fungsi									
	e. Struktur organisasi									
	f. Dasar hukum pembentukan OPD									
2.	Profil singkat Kepala OPD	√			Kepala BKPP	Sleman, 2020	√	√	Website BKPP	Permanen
	a. Nama									
	b. Latar belakang pendidikan									
	c. Penghargaan yang pernah diterima									
3.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	√			Kepala BKPP	Sleman, 2020	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	10 tahun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	c.	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak									
	d.	Alasan penolakan informasi									
9.		Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang terdiri atas :		√		Kepala BKPP	Sleman, 2020	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	permanen
	a.	Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut									
	b.	Rancangan peraturan, keputusan, keputusan atau kebijakan tersebut									
	c.	Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut									
	d.	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan									
10.		Informasi tentang pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan		√		Kepala BKPP	Sleman, 2019	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	permanen
	a.	Pedoman pengelolaan kepegawaian									
	b.	SOP pelayanan publik									
11.		Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh organisasi perangkat daerah		√		Kepala BKPP	Sleman, 2020	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	5 tahun
12.		Data perbendaharaan atau inventaris		√		Kepala BKPP	Sleman, 2020	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	permanen
13.		Rencana strategis dan rencana kerja OPD		√		Kepala BKPP	Sleman, 2017	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	Permanen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Agenda kerja pimpinan OPD		√		Kepala BKPP	Sleman, 2020	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	2 tahun
15.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum dan atau press release		√		Kepala BKPP	Sleman, 2017	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	2 tahun
16.	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik			√	Kepala BKPP	Sleman, 2017	√	√	Website BKPP Arsip BKPP	permanen



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

H. PRIYO HANDOYO, SH, M.Si

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2020**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	1) Data Pribadi pelamar umum CPNS	UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Selama proses rekrutmen (sampai dengan penerbitan SK CPNS)	Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan; • Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.
	2) Data pribadi tenaga honorer kategori II	PP No.48 tahun 2005 jo PP No.56 tahun 2012	Selama yang bersangkutan menjadi tenaga honorer kategori II	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data informasi yang bersangkutan
	3) Biodata Pegawai	a. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi pegawai 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 		informasi yang bersangkutan
	b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Pasal 17 huruf h angka 2 UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	1) Hasil Uji Kesehatan Pegawai	PP No.26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi pegawai • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi
	2) Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling	Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Selama menjadi pegawai • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	3) Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
	c. Hasil-hasil Evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 jo tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	1) Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	PP No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen PNS	Menyesuaikan jadwal retensi arsip	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja • Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.
	2) Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	PP No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen PNS	Menyesuaikan jadwal retensi arsip	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja • Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.

1	2	3	4	5	6
	3) Dokumen sidang Tim Penilai Kinerja PNS	PP No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen PNS	Menyesuaikan jadwal retensi arsip	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang.
	4) Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian	PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan pegawai
	5) Rincian gaji PNS	PP No.7 Tahun 1977 jo PP No.34 tahun 2014	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia; Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
	6) Dokumen proses mutasi antar daerah	PP No. 11 Th. 2017 tentang Manajemen PNS	Sampai diterbitkan SK Penempatan	Mengungkap data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia(SR) dan rahasia (R) dan Kofidensial	a. Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Prov. DIY, b. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Hingga proses surat tersebut selesai	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat kebijakan Pimpinan, Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa
3.	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	a. Pasal 66 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
		b. Perpres no. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa			

1	2	3	4	5	6
4.	Kode Akses elektronik aplikasi	Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
5.	Pengaduan	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses pengaduan selesai	Mengungkapkan data pribadi pihak lain yang melakukan pengaduan	Menjaga suasana kondusif selama proses berlangsung
6.	Izin Perceraian PNS	a. UUNo.8 tahun 1974 tentang Perkawinan; b. PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawainan dan Perceraian PNS	Proses perizinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Kelancaran proses perceraian
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan (rincian kasus)	Peraturan Mendagri No 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang	Menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Rekomendasi/Pernyataan yang dimuat dalam LHP dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola
10.	Hukuman Disiplin Pegawai	PP No. 53 th.2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai	Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
11.	Penilaian Prestasi Kerja PNS	PP 46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

H. PRIYO HANDOYO, SH, M.Si